

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DIY NO 1
TAHUN 2017 DALAM PERANCANGAN INTERIOR
BANGUNAN PEMERINTAH**

(Studi pada Ruang Sidang Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Yogyakarta)



PENCIPTAAN/PERANCANGAN

oleh:

Novi Budi Raharja

NIM 1510150123

**PROGRAM STUDI S-1 DESAIN INTERIOR
JURUSAN DESAIN FAKULTAS SENI RUPA
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

2020

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DIY NO 1 TAHUN 2017 DALAM PERANCANGAN INTERIOR BANGUNAN PEMERINTAH

(Studi pada Ruang Sidang Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Yogyakarta)



PENCIPTAAN/PERANCANGAN

oleh:

Novi Budi Raharja

NIM 1510150123

Tugas Akhir ini diajukan kepada Fakultas Seni Rupa
Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana S-1 dalam bidang
Desain Interior
2020

ABSTRAK

Ruang sidang paripurna DPRD Kota Yogyakarta merupakan salah satu ruangan penting di dalam gedung anggota dewan perwakilan. Fungsi utama ruang sidang paripurna digunakan untuk menentukan keputusan atau undang-undang oleh anggota dewan bersama kepala daerah. Ruang sidang DPRD yang merupakan bangunan pemerintah seharusnya memiliki standar yang sesuai dengan aturan pemerintah. Selain itu sebagai bagian Pemerintah Daerah Yogyakarta yang memberlakukan Perda DIY nomor 1 tahun 2017 yaitu tentang arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta, ruang sidang paripurna seharusnya memiliki citra keistimewaan Yogyakarta tersebut. Tujuan perancangan ruang sidang paripurna DPRD Kota Yogyakarta ini untuk mengoptimalkan kegiatan anggota dewan dan staff melalui peningkatan kualitas dan fasilitas. Selain memperhatikan citra dan tema tradisional Jawa dan mengacu pada standar bangunan pemerintah, perancangan ini juga memperhatikan sirkulasi, warna dan bentuk *furniture* yang mencerminkan anggota dewan yang terhormat.

Kata kunci: interior, sidang paripurna, DPRD, keistimewaan, ekletik

Abstract

The plenary session room of the Regional House of Representatives (DPRD) of the City of Yogyakarta is one of the important rooms in the building of parliament. The main function of the plenary session is used to determine decisions or laws by board members with the head of the district. Plenary session room Regional representative council is part of government buildings should have standards that are in accordance with government regulations. In addition, as part of the Yogyakarta Regional Government which enacts the Regional Regulation of DIY number 1 in 2017, which is about building architecture characterized by the Special Region of Yogyakarta, the plenary room should have the image of Yogyakarta's privilege. The purpose of the design of the plenary session room of the Regional Representative Council of the City of Yogyakarta is to optimize the activities of board members and staff through improving quality and facilities. In addition to paying attention to traditional Javanese images and themes and referring to government building standards, this design also pays attention to the circulation, color and shape of furniture that reflects honorable board members. This design uses traditional Javanese themes by taking the form of Javanese architecture and integrating it with an eclectic style so that it is in harmony with the image of the DPRD and the times.

Keywords: interior, plenary session, DPRD, privileges, eclectic

Tugas Akhir Pengkajian berjudul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DIY NO 1 TAHUN 2017
DALAM PERANCANGAN INTERIOR BANGUNAN PEMERINTAH
(Studi pada Ruang Sidang Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta)** diajukan oleh Novi Budi Raharja, NIM 1510150123, Program
Studi S-1 Desain Interior, Jurusan Desain, Fakultas Seni Rupa, Institut Seni
Indonesia Yogyakarta, telah dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji Tugas
Akhir pada tanggal 16 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk
diterima.

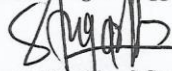
Pembimbing I/Anggota



Martino Dwi Nugroho, S.Sn., MA.

NIP 19770315 200212 1 005 / NIDN 0015037702

Pembimbing II/Anggota



Hangga Hardika, S.Sn., M.Ds.

NIP 19791129 200604 1 005

Cognate



Yavu Rubiyanti, S.Sn., M.Sn

NIP 19860924 201404 2 001/ NIDN 0029117906

Ketua Program Studi/Ketua/Anggota



Bambang Pramono, S.Sn., M.A

NIP 19730830 200501 1 001/ NIDN 0030087304

Ketua Jurusan/Ketua



Martino Dwi Nugroho, S.Sn., MA.

NIP 19770315 200212 1 005 / NIDN 0015037702



Mengetahui,
Dekan Fakultas Seni Rupa
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Novi Budi Raharja, M.Hum.

NIP 19691108 199303 1 001/ NIDN 0008116906

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugrah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perancangan dengan judul : **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DIY NO 1 TAHUN 2017 DALAM PERANCANGAN INTERIOR BANGUNAN PEMERINTAH** (Studi pada Ruang Sidang Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta)”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya tugas akhir ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Tugas akhir ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang telah tulus ihklas memberikan kasih saying, cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan materiil yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya untuk mengasuh, mendidik, membimbing dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan alunan doa yang tiada henti agar penulis sukses dalam mencapai cita-cita. Terima kasih juga kepada saudara dan saudari saya yang sudah mengandeng tangan penulis dengan doa.

Penulisan ini tidak akan dapat terwujud tanpa bantuan yang tulus dari berbagai pihak. Pada akhirnya, penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Martino Dwi Nugroho, S.Sn., MT dan Bapak Hangga Hardika S.Sn., M.Des. , selaku Dosen Pembimbing
2. Bapak dan Ibu, serta saudara tercinta.
3. Sahabat dan teman-teman terkasih.
4. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih

Akhir besar harapan penulis, semoga karya yang sederhana dan jauh dari kesempurnaan ini berguna bagi semua khususnya program studi Desain Interior ISI Yogyakarta.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Metode Desain.....	3
1. Proses Desain	3
2. Metode Desain	5
BAB II.....	8
PRA DESAIN.....	8
A. Tinjauan Pustaka.....	8
1. Tinjauan Pustaka	8
2. Tinjauan Pustaka Khusus.....	17
B. Program Desain	17
1. Tujuan Desain	17
2. Fokus / Sasaran Desain.....	18
3. Data	18
4. Daftar Kebutuhan dan Kriteria.....	41

BAB III.....	43
PERMASALAHAN DESAIN.....	43
A. Pernyataan Masalah	43
B. Ide Solusi Desain	43
1. Konsep Perancangan	43
2. Tema dan Gaya	46
3. Ide Solusi Desain	49
BAB IV	52
PENGEMBANGAN DESAIN	52
A. Alternatif Desain.....	52
1. Alternatif Estetika Ruang	52
2. Alternatif Penataan Ruang.....	58
3. Alternatif Elemen Pembentuk Ruang.....	61
4. Alternatif Pengisi Ruang	64
5. Alternatif Tata Kondisi Ruang.....	65
B. Evaluasi Pemilihan Desain (<i>Choose / Evaluation</i>).....	70
1. Suasana Ruang	70
2. <i>Zoning</i> dan Sirkulasi.....	71
3. Layout.....	72
4. Rencana Lantai.....	73
5. Rencana Dinding.....	74
6. Rencana Plafon	75
7. <i>Furniture</i>	76
C. Hasil Desain	77
1. Rendering Perspektif / Presentasi Desain	77

2. Layout.....	81
3. Detail Khusus (<i>Costume Furniture</i> & Elemen Dekoratif)	82
BAB V.....	84
PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung.....	14
Tabel 2. Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Pemerintahan/Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara.....	14
Tabel 3. Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung.....	15
Tabel 4. Standar Luas Ruang Gedung Kantor.....	15
Tabel 5. Tabel Daftar Kebutuhan dan Kriteria	41
Tabel 6. Pemikiran Robert Venturi terhadap Gaya Ekletik	48
Tabel 7. Pernyataan Masalah dan ide solusi	50
Tabel 8. Alternatif Furniture	64
Tabel 9. Alternatif Equipment.....	65
Tabel 10. Tingkat Pencahayaan Minumum yang direkomendasikan dan Renderasi Warna	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Proses Desain.	4
Gambar 2. Ruang Paripurna Parlemen Amerika Serikat	11
Gambar 3. Ruang Paripurna Parlemen Finlandia	11
Gambar 4. Ruang Paripurna Parlemen Indonesia.....	12
Gambar 5. Ruang Paripurna Parlemen Australia.....	12
Gambar 6. Ruang Paripurna Parlemen Jerman.....	12
Gambar 7. Ruang Paripurna Parlemen Inggris.....	13
Gambar 8. Peta Lokasi Proyek	19
Gambar 9. Layout Ruang Sidang Paripurna.....	22
Gambar 10. Zoning Ruang Sidang Paripurna	22
Gambar 11. Sirkulasi Ketua/Wakil Sidang dan Walikota/Wakil Walikota	23
Gambar 12. Sirkulasi Anggota Dewan	23
Gambar 13. Sirkulasi Staff/ PNS	24
Gambar 14. Sirkulasi Masyarakat Umum/Wartawan	24
Gambar 15. Pola Lantai Satu.....	25
Gambar 16. Pola Lantai Ruang Sidang.....	25
Gambar 17. Pola Lantai Balkon dan Ruang Kontrol	25
Gambar 18. Dinding Depan Ruang Sidang.....	26
Gambar 19. Gambar Kerja dan Pola Pelapis Dinding Ruang Sidang.....	27
Gambar 20. Ruang Akustik	28
Gambar 21. Gambar Kerja dan Pola Plafon Ruang Sidang Paripurna	28
Gambar 22. Meja dan Kursi Pimpinan Sidang Paripurna	29
Gambar 23. Meja dan Kursi Anggota Dewan	29
Gambar 24. Meja dan Kursi Staff/PNS.....	30
Gambar 25. Balkon untuk Wartawan dan Masyarakat Umum.....	30
Gambar 26. Kursi Tunggu.....	30
Gambar 27. Podium Ruang Sidang.....	31
Gambar 28. Lambang Negara di Panggung Ruang Sidang Paripurna.....	32

Gambar 29. Meja yang Digunakan untuk Penandatanganan Perjanjian/Keputusan	34
Gambar 30. Meja dan Kursi di Ruang Kontrol Sidang.....	34
Gambar 31. Toilet.....	35
Gambar 32. Gambar kerja Titik Lampu pada Ruang Sidang Paripurna	35
Gambar 33. Gambar Kerja Titik Lampu pada Tumpangsari	36
Gambar 34. Lampu Gantung pada Tumpangsari.....	36
Gambar 35. Penggunaan AC Split pada Ruang Sidang Paripurna	37
Gambar 36. Sistem Pemadam dan Alarm Kebakaran.....	38
Gambar 37. Gambar Kerja Ramp Gedung DPRD Kota Yogyakarta	38
Gambar 38. Tangga Utama Menuju Ruang Sidang Paripurna	39
Gambar 39. Sound System yang Berada di Ruang Sidang Paripurna	39
Gambar 40. Pemantulan Suara di Ruangan.....	40
Gambar 41. CCTV yang Berada di Dalam Ruang Sidang Paripurna.....	40
Gambar 42. Tumpangsari, Elemen Estetis pada Plafon Hall dan Ruang Sidang Paripurna	40
Gambar 43. Ukiran pada Setiap Pintu di Ruang Sidang Paripurna	41
Gambar 44. Ukiran Gebyok pada Background Panggung	41
Gambar 45. Sketsa Perbedaan Tajug dan Joglo	44
Gambar 46. Sketsa Bagian Rumah Joglo	45
Gambar 47. Penerapan Filosofi Rumah Joglo pada Ruang Sidang	46
Gambar 48. Mind Mapping	46
Gambar 49. Saka Guru dan Batik Purbonegoro	47
Gambar 50. Mood Board Alternatif 1	52
Gambar 51. Mood Board Alternatif 2	52
Gambar 52. Sketsa Desain Fasad.....	53
Gambar 53. Sketsa Desain Ruang Tunggu.....	53
Gambar 54. Sketsa Desain Ruang Sidang.....	54
Gambar 55. Transformasi dan Repetisi Batik Purbonegoro	56
Gambar 56. Skema Warna	57
Gambar 57. Skema Material.....	57

Gambar 58. Diagram Matrix	58
Gambar 59. Diagram bubble	58
Gambar 60. <i>Zoning</i> dan Sirkulasi Alternatif 1	59
Gambar 61. <i>Zoning</i> dan Sirkulasi Alternatif 2	59
Gambar 62. Layout Alternatif 1	60
Gambar 63. Layout Alternatif 2	60
Gambar 64. Rencana Lantai Alternatif 1	61
Gambar 65. 2 Rencana Lantai Alternatif 2	61
Gambar 66. Rencana Dinding Alternatif 1.....	62
Gambar 67. Rencana Dinding Alternatif 2.....	62
Gambar 68. Rencana Plafon Alternatif 1	63
Gambar 69. Rencana Plafon Alternatif 2	63
Gambar 70. Analisis Alternatif Suasana Ruang	70
Gambar 71. Analisis Alternatif Zoning dan Sirkulasi	71
Gambar 72. Analisis Alternatif Layout.....	72
Gambar 73. Analisis Alternatif Rencana Lantai.....	73
Gambar 74. Analisis Alternatif Dinding	74
Gambar 75. Analisis Alternatif Plafon.....	75
Gambar 76. Analisis Alternatif Furniture	76
Gambar 77. 3D Model Fasad Gedung DPRD Kota Yogyakarta.....	77
Gambar 78. 3D Model Prefunction Hall	77
Gambar 79. 3D Model Receptionist dan Entrance	78
Gambar 80. 3D Model Waiting Lounge	78
Gambar 81. 3D Model Ruang Sidang Paripurna.....	78
Gambar 82. 3D Model Podium dan Kursi Pimpinan Sidang	79
Gambar 83. 3D Model Kursi Anggota Dewan dan staff.....	79
Gambar 84. 3D Model Kursi Balkon.....	79
Gambar 85. 3D Model Ruang Kontrol	80
Gambar 86. 3D Model Toilet	80
Gambar 87. Gambar Kerja Layout	81
Gambar 88. Furniture Waiting Lounge.....	82

Gambar 89. Meja Resepsionis	82
Gambar 90. Kursi Pimpinan Dewan	82
Gambar 91. Meja Anggota dan Meja Pimpinan Sidang	83
Gambar 92. Meja perjanjian dan Podium	83
Gambar 93 Cermin Entryway dan Kursi Auditorium.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 364, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. Seperti halnya DPR RI, DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan bersama kepala daerah dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota. Lembaga ini terbentuk dari kedaulatan rakyat daerah melalui pemilihan umum untuk menjadikan wakil mereka dalam menyalurkan aspirasi rakyat di tingkat Kabupaten karena, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedaulatan adalah kekuasaan yang sah (menurut hukum) yang tertinggi, kekuasaan tersebut meliputi segenap orang ataupun golongan yang ada dalam masyarakat yang dikuasainya, tetapi dalam pelaksanaan kehendak kepada pihak lain tidak selalu harus menggunakan tindakan paksaan, namun dapat dilaksanakan dengan kewibawaan dan keterbukaan. Dalam hal ini rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi, menentukan kehendaknya, apa yang diperbuat dan bagaimana pelaksanaannya. Hal ini disebut sistem pemerintahan rakyat, dimana yang menyelenggarakan pemerintahan adalah rakyat atau setidaknya rakyat ikut membicarakan dan memikirkan permasalahan pemerintah (demokrasi).

Salah satu fungsi legislasi DPRD adalah fungsi untuk membentuk peraturan daerah (perda) bersama kepala daerah. Peraturan daerah atau keputusan ini merupakan hasil dari rapat paripurna. Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. Rapat ini diadakan secara berkala dan dapat dilaksanakan atas usul kepala daerah, pimpinan alat kelengkapan DPRD, atau

anggota dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari satu fraksi.

Provinsi Yogyakarta yang merupakan daerah istimewa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapatkan Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY atau UU Keistimewaan yang telah disahkan pada tahun 2012. Hal ini memberikan wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Dalam kaitan arsitektural, pemerintah daerah Yogyakarta memberlakukan Perda DIY nomor 1 tahun 2017 yaitu tentang arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Perda DIY Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 6 Ayat 2, diberlakukan pada bangunan milik perseorangan, kelompok orang, masyarakat, Pemerintah/Pemerintah Daerah, atau badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

Kantor DPRD Kota Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ipda Tut Harsono No.43, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165. Berada di utara kompleks Balai Kota Yogyakarta. Gedung DPRD Kota Yogyakarta merupakan bangunan pemerintah daerah terdiri dari 2 bangunan utama yang disambungkan oleh koridor. Bangunan depan digunakan oleh anggota dewan legislatif pemerintah kota Yogyakarta untuk menjalankan aktifitas dan wewenangnya, sedangkan bangunan belakang digunakan sebagai kantor administrasi. Gedung ini memiliki fungsi yang cukup memadai sesuai standar bangunan pemerintah dan berpatokan atas perda yang mengatur tentang arsitektural yang berciri khas Jawa, khususnya yang mencerminkan kota Yogyakarta sebagai kota budaya.

Ruang sidang paripurna DPRD Kota Yogyakarta berada di lantai 3 dari gedung utama. Ruang sidang ini memiliki luas. Daya tampung ruangan dapat menampung seluruh kelengkapan dan sekretariat dewan DPRD Kota Yogyakarta. Namun dilihat dari keadaan ruangnya, ruang sidang paripurna tersebut dinilai tidak efektif, estektis dan fungsional. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh

1. Tuntutan Masyarakat Terhadap Pelayanan Anggota Dewan

Masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dari pelaksanaan program kerja dewan legislatif mempunyai pengaruh besar dalam sistem tata pemerintahan, dimana masyarakat sendiri menjadi pengontrol jalannya pemerintahan yang secara sistematis diwakili oleh kewenangan anggota dewan. Peran masyarakat yang tercermin dalam kegiatan pemerintahan merupakan wujud dari perlunya wadah yang merespon sistem tersebut, kebutuhan akan ruang untuk peran masyarakat dari pelaksanaan agenda kerja DPRD haruslah menjadi perhatian pada terciptanya suatu perubahan yang nyata seperti, perlunya ruang tambahan bagi wadah persidangan yang mengikutsertakan peran langsung dari masyarakat, perlu pelayanan pada kegiatan demonstrasi.

2. Ketidaksesuaian antara Kebutuhan dan Kapasitas Ruang

Perubahan menuju perbaikan sistem kerja pada ruang sidang DPRD kota Yogyakarta merupakan fakta yang harus direspon dengan wadah yang dapat mendukung aktifitas kegiatan didalamnya.

3. Penerapan interior sebagai Simbol Identitas dan Jati DPRD

Latar belakang penerapan interior pada ruang sidang DPRD kota Yogyakarta adalah dilihat dari kesan/citra yang diusung penulis untuk menentukan model tampilan bangunan dalam penerapan interior berdasarkan fungsi atau sifat lembaga.

4. Penerapan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 16 Ayat 1 sebagai Simbol Identitas kota Yogyakarta

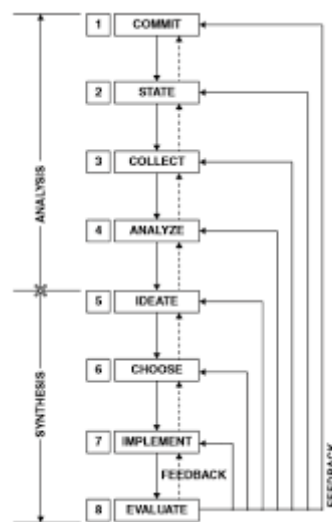
Yogyakarta sebagai kota budaya memiliki ciri khas dalam arsitektural. Tidak hanya berciri tradisional jawa, arsitektur berciri khas DIY meliputi gaya kolonial, indis, dan cina.

B. Metode Desain

1. Proses Desain

Pada perancangan ini penulis menggunakan pola pikir perancangan yang disebutkan dalam buku karya Rosemary & Otie Kilmer tahun 2014, yang

mana disebutkan bahwa pada pola pikir ini terdapat 2 bagian pada Proses Desainnya yaitu, Analisa yang masuk dalam kategori *programming* dan sintesa yang merupakan langkah *designing*. *Programming* merupakan penganalisaan permasalahan dimana kita mengumpulkan semua data fisik, non-fisik, literatur dan data tambahan lainnya yang akan berguna nantinya. Langkah selanjutnya setelah data yang dibutuhkan terkumpul adalah tahap *designing*, pada tahap ini terjadilah proses sintesa, dimana muncul solusi permasalahan berupa beberapa bentuk ide alternatif yang selanjutnya akan dipilih yang mana yang dapat menjadi pemecah masalah teroptimal.



Gambar 1. Diagram Proses Desain.
(Sumber : Kilmer & Kilmer, 2014, hal 178)

Dalam pola pikir perancangan Proses Desain ini, tahapan yang dikerjakan adalah sebagai berikut :

- a. *Commit* adalah menerima atau berkomitmen dengan masalah
- b. *State* adalah mendefinisikan masalah
- c. *Collect* adalah mengumpulkan fakta
- d. *Analyze* adalah menganalisa masalah dan data yang telah terkumpulkan.
- e. *Ideate* adalah mengeluarkan ide dalam bentuk skematik dan konsep

- f. *Choose* adalah memilih alternatif yang paling optimal dari ide-ide yang ada
- g. *Implement* adalah melaksanakan penggambaran dalam bentuk pencitraan 2D dan 3D serta presentasi yang mendukung
- h. *Evaluate* adalah meninjau desain yang dihasilkan apakah sudah memecahkan masalah atau belum (Kilmer & Kilmer, 2014, hal. 181-195)

2. Metode Desain

Berdasarkan proses desain diatas, penulis membagi proses tersebut menjadi 3 tahapan metode desain.

a. Metode Pengumpulan Data & Penelusuran Masalah

Commit (Accept the Problem), Tahap paling awal yang harus dilakukan seorang desainer dalam proses mendesain adalah menerima “masalah” yang ada. Langkah yang dapat dilakukan untuk dapat menerima permasalahan adalah *prioritization* (dengan membuat *time schedule, priority list*) dan *Personal Value Analogies* (cara untuk membuat “permasalahan” menjadi lebih “bernilai” misalnya dengan menyelesaikan permasalahan dengan cara yang unik dan kreatif)

State (Define the Problem), Menetapkan permasalahan merupakan sebuah tahap awal yang sangat penting karena pasti akan berdampak langsung terhadap solusi akhir. Tahap menetapkan permasalahan bisaanya dipengaruhi oleh masalah-masalah yang berkaitan dengan persyaratan, kendala, keterbatasan, dan asumsi-asumsi yang ada.

Collect (Gather the Facts), Setelah permasalahan dapat dipahami, desainer harus mencari informasi yang berkaitan dengan masalah. Tahap ini melibatkan banyak penelitian, data, dan survey. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi adalah dengan *interviews* pengguna ruang (pengelola dan pengunjung), *survey* pengguna dan mencari referensi dari proyek yang serupa.

Analyze, Desainer harus meneliti informasi yang didapat mengenai permasalahan dan mengelompokkannya dalam kategori-kategori yang berhubungan. Data dan informasi harus disaring, hanya yang berpengaruh terhadap solusi akhir dan berkaitan dengan permasalahan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisa masalah dengan *conceptual sketches*, *matrix* dan *categorization*

b. Metode Pencarian Ide & Pengembangan Desain

Ideate, Tahap paling kreatif dalam proses desain dimana ideid`e/alternatif untuk mencapai tujuan perancangan muncul. Proses pencarian ide memiliki 2 tahap yaitu *drawing phase* (mencakup gambar diagram, plan, sketch yang menunjang kebutuhan dan fungsi ruang) dan *concept statement* (tahap dimana insprasi dan ide dituangkan dalam kalimat).

Choose (Select the Best Option), Tahap dimana desainer harus memilih pilihan terbaik dilihat dari konsep yang cocok dengan budget, kebutuhan, hal objektif, dan keinginan klien. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memilih dan menetapkan altenatif terbaik adalah *personal judgement* (membandingkan setiap pilihan yang ada dan memutuskan pilihan yang paling memenuhi tujuan permasalahan, biasanya desainer memilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan diskusi dengan ahli) dan *comparative analysis* (Meningkatkan metode *personal judgement* untuk pembuatan keputusan dengan membandingkan bagaimana satu solusi lebih baik dari yang lain.)

Implement (Take Action), Tahap dimana ide yang terpilih dituangkan dalam bentuk fisik seperti final drawing, denah, rendering, dan presentasi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menuangkan ide ke dalam bentuk fisik yaitu *final design drawings*, *budgets* dan *construction drawing*. *Final design drawings* berupa denah, tampak, potongan, dan detail-detail. *Budgets* yaitu permasalahan biaya harus dipertimbangkan

oleh desainer untuk menghindari over cost dalam sebuah proyek dengan membuat estimasi biaya proyek. *Construction drawings* yaitu gambar kerja skalatis yang berupa detail-detail khusus dalam sebuah project.

c. Metode Evaluasi Pemilihan Desain

Evaluate, Proses review dan membuat penilaian kritis dari apa yang sudah dicapai apakah sudah berhasil memecahkan permasalahan. Melihat apa yang dipelajari/didapat dari pengalaman dan apa pengaruh/hasil desain. Sebagai pedoman desainer untuk menyelesaikan masalah-masalah selanjutnya yang akan dihadapi.

Feedback, Merupakan istilah yang digunakan untuk melakukan evaluasi pada setiap tahap desain. Langkah untuk membandingkan antara hasil desain dengan proses pengerjaan proyek di lapangan